
ANALISIS PENGARUH KEKUATAN EKONOMI DAN POLITIK DALAM PERUMUSAN STRATEGI PERTAHANAN NEGARA

Hasto Kristiyanto, Purnomo Yusgiantoro, Amrulla Octavian, I Wayan Midhio

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email: hasto66@gmail.com, purnomoys@gmail.com, amarulla.octavian@idu.ac.id, and wayan.midhio@idu.ac.id

Abstrak

Aspek ekonomi dan politik sangat berpengaruh dalam perumusan strategi pertahanan negara. Perkembangan dua aspek tersebut mempengaruhi kekuatan militer suatu negara. Penelitian ini membahas pengaruh kekuatan ekonomi dan politik dalam merumuskan strategi pertahanan negara. Teori yang digunakan ada dua, teori strategi dan SWOT analysis. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan studi literatur dan analisis data menggunakan Miles dan Huberman, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi data dan triangulasi data. Hasil penelitian membuktikan bahwa pembahasan tentang aspek *grand strategy*, *elements of strategy*, dan pembangunan startegi pertahanan negara, maka secara umum ditegaskan bahwa pertahanan negara sangat menentukan *survival* tidaknya suatu bangsa. Untuk itu, maka berbagai kelemahan secara ekonomi dan politik harus diatasi, dan pada saat bersamaan memperbesar peluang dan membangun kapabilitas pertahanan nasional guna mengatasi berbagai tantangan guna memperkuat sumber daya nasional bagi pertahanan negara.

Kata kunci: ekonomi; politik; strategi pertahanan

Abstract

The economic and political aspects are very influential in the formulation of the national defense strategy. The development of these two aspects affects the military strength of a country. This study discusses the influence of economic and political forces in formulating a national defense strategy. There are two theories used, strategy theory and SWOT analysis. The method used is qualitative with literature study and data analysis using Miles and Huberman, data reduction, data presentation, conclusion drawing/data verification and data triangulation. The results of the study prove that the discussion of aspects of grand strategy, elements of strategy, and the development of a national defense strategy, it is generally emphasized that national defense greatly determines the survival of a nation. For this reason, various economic and political weaknesses must be overcome, and at the same time increasing opportunities and building national defense capabilities to overcome various challenges in order to strengthen national resources for national defense.

Keywords: economy; political; defense strategy

Diserahkan: 02-02-2022

Diterima: 25-02-2022

Diterbitkan: 20-03-2022

Pendahuluan

Kekuatan ekonomi, politik dan militer merupakan salah satu keharusan dalam mempertahankan suatu negara. Seiring dengan perkembangan lingkungan strategis, kondisi perekonomian dan perpolitikan suatu bangsa sangat mempengaruhi kebijakan pertahanan dan juga kekuatan militer. Ekonomi akan mendukung anggaran pertahanan, sedangkan dari sisi politik akan menentukan kebijakan anggaran, arah pertahanan dan juga kebijakan strategis lainnya yang mendukung dan mempengaruhi perumusan strategi pertahanan suatu negara.

Isu mengenai keterkaitan antara stabilitas politik dengan pembangunan ekonomi merupakan isu klasik yang sudah menjadi fokus perhatian, sekaligus keprihatinan semua pihak selama beberapa dasawarsa. Hal tersebut kemudian menjadi persoalan yang makin krusial sejak Indonesia mengalami transformasi politik yang sangat mendasar dengan menerapkan demokrasi pascareformasi selama beberapa tahun terakhir ini. Selanjutnya kemudian meluas menjadi persoalan keterkaitan antara konsolidasi demokrasi di satu pihak serta pada lain pihak upaya peningkatan peran investasi swasta dan peningkatan kemakmuran rakyat ataupun kesejahteraan masyarakat.

Pada era demokrasi, perekonomian dan pelaku-pelaku ekonomi dalam sebuah demokrasi yang terkonsolidasi tidak dapat dikelola berdasarkan ekonomi komando, sebaliknya tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar yang murni. Perekonomian yang sepenuhnya mengacu pada mekanisme pasar yang murni dapat menjadi sebab timbulnya ketidakadilan yang meluas, yang pada gilirannya menjadi sebab kegagalan pasar. Oleh karena itu, untuk mendukung terciptanya rasa keadilan dan efisiensi, serta menjamin berjalannya perekonomian seperti yang diharapkan, diperlukan demokrasi yang terkonsolidasi. Dengan demikian, perlu dilakukan pemberdayaan kekuatan-kekuatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dengan dukungan kuat dari parlemen dan pemerintah, dengan menerapkan strategi bersama yang sekaligus pro pada kemandirian ekonomi nasional (Bappenas, 2006).

Kemudian, dari sisi politik nasional, sejak berakhirnya Orde Baru pada 1998, polarisasi kekuatan politik sipil masih cenderung ke arah menguatnya ikatan-ikatan politik yang bersifat kurang rasional serta lebih banyak mengutamakan sentimen-sentimen keagamaan yang sempit dan simbolsimbol kedaerahan yang bersifat eksklusif. Hal ini cenderung ini tidak mendukung kehidupan demokrasi politik secara modern dan efektif dalam melayani kepentingan-kepentingan masyarakat sipil secara luas. Destabilitas politik dapat mudah sekali dipicu oleh pertentangan dari berbagai kelompok-kelompok yang seringkali kurang rasional secara politik. Pertentangan ataupun konflik antara parpol dan organisasi masyarakat yang berorientasi pada ikatan tradisional seringkali bertentangan dengan kepentingan nasional yang memerlukan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Padahal stabilitas politik merupakan salah satu

kunci dari pemulihan perekonomian dan selanjutnya pengembangan sistem perekonomian yang pro masyarakat banyak.

R. William Liddle, Profesor Ilmu Politik dari Ohio state University mengatakan, ada dua unsur fisik mendasar (hardware) dalam membangun kekuatan bangsa yaitu faktor ekonomi dan militer disamping juga *critical mass* (Liddle, 2012). Artinya, jika kita tidak memiliki ekonomi dan militer yang kuat, maka pertahanan negara pun akan menjadi lemah. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka dalam membangun pertahanan keamanan negara yang kuat kita harus memperhatikan kondisi kedua faktor tersebut.

Tanpa terlepas dari perkembangan dua aspek tersebut, kebijakan dan strategi pertahanan negara juga dipengaruhi faktor tersebut. Selain dua faktor itu, posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berada pada persilangan strategis antara dua samudera dan dua benua dengan segala kekayaan alamnya di satu sisi memberikan banyak keuntungan. Namun, pada sisi yang lain melekat pula suatu kerawanan atau kerentanan strategis di dalamnya. Karena itu, diperlukan suatu strategi guna menyelenggarakan pertahanan negara secara optimal untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional.

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas kelemahan ekonomi, politik dan militer dalam konteks perumusan strategi pertahanan Negara Indonesia. Hal itu, untuk melihat peluang dan tantangan yang dihadapi terkait dengan kedua elemen tersebut dan hubungan antar ekonomi dan politik dalam perumusan strategi pertahanan negara.

Landasan Teori

Teori Strategi

Henry Lee Scott dalam *Military Dictionary* (1984) menjelaskan definisi tentang strategi yakni sebagai suatu seni dalam merumuskan rencana kampanye yang memadukan sistem operasi militer yang ditentukan pada tujuan akhir yang ingin dicapai, pemahaman terhadap karakter musuh, mendayagunakan sifat dan sumber daya negara, serta sarana penyerangan dan pertahanan. Lebih lanjut Liddle Hart menjelaskan bahwa seni yang dimaksud adalah perihal mendistribusikan dan menerapkan sarana militer untuk memenuhi tujuan kebijakan (aspek politik) selain itu juga menghitung dan mengembangkan sumber daya ekonomi serta tenaga kerja bangsa (aspek ekonomi) (Putro, 2021).

Barlett dan Holman dalam tulisannya, *The Art of Strategy and Force Planning* menyatakan bahwa dalam perumusan *grand strategy* pertahanan, perspektif multidimensi harus menyajikan konsepsi menyeluruh yang dengan jelas mengatur tentang bagaimana ekonomi, diplomatik (politik), dan instrumen militer dari kekuatan nasional (*national power*) dipergunakan untuk mencapai kepentingan dan kebijakan nasional. Hal tersebut diperlukan agar strategi raya dapat meningkatkan kapabilitas pertahanan sekaligus menjawab tantangan dan ancaman di tengah perkembangan jaman yang semakin kompleks.

Berdasarkan definisi tentang strategi dan *grand strategy* di atas, pembahasan berkaitan dengan apa kekuatan dan kelemahan elemen ekonomi dan elemen politik dalam

konteks Negara Indonesia dalam rangka perumusan strategi pertahanan Negara Indonesia, dibahas terlebih dahulu kerangka analisis aspek ekonomi dan politik berdasarkan kerangka analisis SWOT sebagai titik pijak atau pendasaran status kondisi elemen-elemen dasar dan pengaruhnya terhadap strategi pertahanan secara keseluruhan.

Analisa SWOT

SWOT merupakan alat analisis yang dikembangkan oleh Humphrey yang digunakan untuk mencari strategi terbaik dalam pengambilan keputusan berdasarkan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan yang berasal dari faktor eksternal (Humphrey, 2005). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut.

1. *Strength*; faktor internal yang mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor pendukung dapat berupa sumber daya, keahlian, atau kelebihan lain yang mungkin diperoleh berkat sumber keuangan, citra, keunggulan di pasar, serta hubungan baik antara buyer dengan supplier.
2. *Weakness*; faktor internal yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor penghambat dapat berupa fasilitas yang tidak lengkap, kurangnya sumber keuangan, kemampuan mengelola, keahlian pemasaran dan citra perusahaan.
3. *Opportunity*; faktor eksternal yang mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor eksternal yang mendukung dalam pencapaian tujuan dapat berupa perubahan kebijakan, perubahan persaingan, perubahan teknologi dan perkembangan hubungan supplier dan buyer.
4. *Threat*; faktor eksternal yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor eksternal yang menghambat perusahaan dapat berupa masuknya pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lambat, meningkatnya bargaining power daripada supplier dan buyer utama, perubahan teknologi serta kebijakan baru

Secara sederhana, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: SWOT Analysis (Sumber: www.jurnal.id)

Sebagaimana sebuah metode pada umumnya, analisa SWOT ini hanya dapat membantu menganalisa situasi yang sedang dihadapi oleh perusahaan atau sebuah organisasi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik pada suatu konteks khusus. Fenomena tersebut diteliti dengan metode ilmiah dan kemudian dideskripsikan dengan menggunakan tata bahasa yang tepat agar dapat dimengerti oleh orang lain (Moleong, 2013).

Kemudian, data penelitian diperoleh melalui studi pustakan yang bertujuan untuk memperoleh data berupa fakta dan keterangan secara langsung dari subyek penelitian. Sedangkan data sekunder yang digunakan diperoleh melalui kegiatan studi pustaka terhadap beberapa dokumen dan literatur yang relevan dengan topik penelitian (Arikunto, 2006).

Selanjutnya, untuk proses analisis data yang didapat dengan menggunakan teori Miles dan Huberman. Adapun analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi data. Dalam proses analisis reduksi data dilakukan triangulasi atau pengecekan antardata yang digunakan (Miles dan Huberman, 1992).

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Ekonomi

1. Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*)

Potret tentang kekuatan sekaligus kelemahan ekonomi saat ini dapat tercermin dan terukur melalui kondisi pandemi Covid-19 yang telah mendera Indonesia selama lebih dari setahun sejak pemerintah mengonfirmasi infeksi korona pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Pandemi bukan hanya menciptakan krisis, karena terganggunya keselamatan dan keamanan masyarakat akibat virus tersebut. Dampak lebih lanjut, pandemi telah menyentuh peri kehidupan rakyat terutama terganggunya relasi sosial, pekerjaan, dan pada gilirannya berdampak pada perekonomian nasional. Pandemi berdampak pada disrupsi tatanan kehidupan rakyat. Sektor perhubungan, pariwisata, konstruksi, dan berbagai aktivitas perekonomian yang melibatkan kontak secara langsung menjadi terganggu. Terlebih setelah keputusan pemerintah untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi dan kegiatan operasional lainnya yang akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Kondisi ekonomi nasional tampak dari sejumlah indikator perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi, Survey Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Indeks Manufaktur (PMI), *Retail Sales Index*, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan jasa keuangan. Pertumbuhan ekonomi mengalami tekanan, akibat penempatan skala prioritas anggaran direlokasikan bagi penanganan pandemi. Pengangguran dan kemiskinan meningkat.

Pada kuartal I 2020, pertumbuhan ekonomi masih tumbuh 2,97 persen (yoy), tetapi memasuki kuartal II 2020, ekonomi berkontraksi hingga 5,32 persen (yoy). Hal ini terkait dengan ditutupnya seluruh sektor usaha untuk mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19. Memasuki kuartal III, saat PSBB mulai dilonggarkan,

kegiatan ekonomi mulai menggeliat dan kontraksi ekonomi berkurang menjadi 3,49 persen (yoy). Demikian juga pada kuartal IV, BPS mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih minus sebesar 2,19 persen (yoy). Hal ini terjadi untuk pertama kalinya sejak Indonesia mengalami kontraksi pada tahun 1998 karena krisis moneter. Pertumbuhan ekonomi yang minus sepanjang tahun 2020 tidak lepas dari daya beli masyarakat yang tergerus selama pandemi. Padahal, konsumsi rumah tangga selama ini menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkontribusi hingga 57 persen. Pandemi 2020 membuat jutaan masyarakat harus kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. Untuk meredam dampak ekonomi Covid-19 tersebut, pemerintah menerbitkan regulasi pemulihan ekonomi nasional melalui Perppu yang kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada 31 Maret 2020.

Meski Indonesia mengalami kontraksi dan secara teknis mengalami resesi karena telah mengalami catatan dua kuartal berturut-turut kontraksi, dalam *point of view* yang lebih luas tampak status ekonomi Indonesia moderat dibandingkan dengan kontraksi yang terjadi di hampir seluruh negara. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Fiskal Kementerian Keuangan, dimana jika dibandingkan dengan negara-negara G20, Indonesia masih menjadi negara besar dengan PDB peringkat 16. Di level negara-negara ASEAN, perekonomian domestik relatif baik, hanya China dan Vietnam yang mencatat angka positif. Secara spesifik dapat ditunjukkan dengan angka realiasi sementara -6,1 persen dari PDB dan sedangkan banyak negara G20 dan ASEAN defisit sangat dalam bahkan *double digit*. Selain itu, rasio utang publik Indonesia termasuk paling rendah dan *manageable* dibandingkan negara lain seperti rasio utang Filipina yang lebih tinggi dari proyeksinya yakni 48,9 persen, Vietnam 46 persen, Thailand 50 persen, Malaysia 67,6 persen, sementara Indonesia 38,5 persen. Dengan demikian, kinerja ekonomi Indonesia cukup *resilient*.

Kekuatan ekonomi nasional juga tampak melalui kemampuan *recovery* yang cepat dibanding negara-negara lain. Meski masih dibayangi-bayangi pandemi, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Kementerian keuangan optimis menilai proyeksi ekonomi Indonesia dalam zona positif, dimana akan mulai *rebound* dan diproyeksi tumbuh 4,8% pada 2021 dan 6% pada tahun 2022. Kekuatan ekonomi nasional tercermin dalam strategi kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk dibentuknya Komite Penanganan Covid-19 yang terdiri atas Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Hal tersebut diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bersama dengan reformasi birokrasi guna membangun iklim investasi yang kondusif, penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan produktivitas. Selain kebijakan ekonomi pemerintah, ekonomi Indonesia juga memiliki kekuatan yang terbukti menopang kebutuhan pangan masyarakat dan menjadi penyelamat ekonomi nasional di masa pandemi yakni sektor pertanian.

Meski demikian, setidaknya ada beberapa kelemahan ekonomi Indonesia yang dapat dicatat. Pertama, beban hutang negara yang meningkat dan cukup besar di tahun 2020. Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa hingga Agustus 2020, Utang Luar Negeri

(ULN) Indonesia meningkat menjadi USD 413,4 miliar, atau sekitar Rp 6.074 triliun. Kedua, masih terdapat ketergantungan import untuk beberapa bahan pokok serta perlunya aspek modernisasi dan teknologi guna mengakselerasi perekonomian nasional.

2. Peluang (*Opportunity*) dan Tantangan (*Threat*)

Kekayaan sumber daya alam dan potensi bonus demografi menjadi dua peluang besar yang masih dapat dioptimalkan. Potensi sumber daya alam Indonesia adalah hutan, laut, minyak bumi, gas alam dan batu bara. Hutan di wilayah Indonesia adalah hutan terluas ketiga di dunia dengan luas mencapai 99 juta hektar dengan segala kekayaan keanekaragaman hayati, kayu dan segala makhluk yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Demikian juga halnya dengan kekayaan sumber daya alam laut berupa biota laut, tambang minyak lepas pantai dan pasir besi. Potensi ikan laut Indonesia smencapai 6 juta ton per tahun, urutan keempat pada 2009 di dunia (Kompas.com, 2021). Hal ini ditambah dengan potensi perindustrian dan perdagangan Indonesia yang berkembang seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur dan revolusi industri.

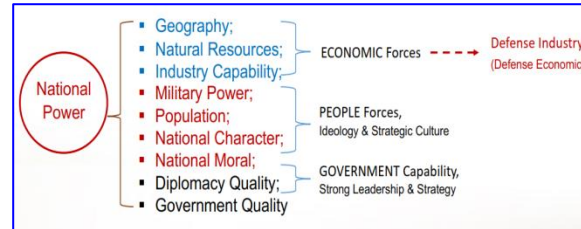
Indonesia diprediksi IMF dan Bank Dunia masuk dalam kelompok negara-negara perekonomian besar di dunia. Bila saat ini peringkat produk domestik bruto (PDB) Indonesia berada pada urutan 16 di antara negara-negara G20, dengan PDB sebesar USD 1,07 triliun, ekonomi Indonesia diproyeksi masuk 10 besar ekonomi dunia. Bahkan, pada tahun 2024, Indonesia diprediksi akan menempati peringkat kelima setelah China, AS, India dan Jepang (SindoNews, 2021). Jumlah populasi kelas menengah dan angkatan kerja yang meningkat menjadi faktor pendorong utama (Merdeka.com, 2021).

Menurut konsultan bisnis McKinsey, peluang Indonesia untuk menjadi 10 besar ekonomi terbesar dunia tersebut dapat dicapai dengan menjawab beberapa tantangan seperti menggenjot produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di kisaran 7% per tahun dengan sejumlah perbaikan, terutama dalam membangun ketahanan ekonomi dengan memperbaiki sistem kesehatan, pangan dan pariwisata domestik serta meningkatkan inovasi industri (Katadata, 2021). Hal terpenting dalam pembangunan ekonomi saat ini adalah kemampuan menangani pandemi dimana para pengamat meyakini bahwa vaksin Covid bertidak sebagai *game changer* utama yang dapat memperkuat stabilitas ekonomi.

Elemen ekonomi dalam hubungan dengan militer pertahanan tidak dapat dipisahkan meskipun selalu muncul polemik klasik “*gun and butter*”. **Ekonomi membutuhkan kekuatan militer pertahanan untuk menjaga wilayah kedaulatan dengan seluruh kekayaan alam di dalamnya, termasuk ancaman non-militer yang kerap terjadi seperti pencurian ikan (*illegal fishing*), pembalakan liar (*illegal logging*) maupun aksi terorisme yang dapat merugikan kepentingan ekonomi nasional.**

Di sisi lain, melihat perkembangan dinamika lingkungan strategis yang masif dan eksponensial dengan segala kemajuan teknologi, pengeluaran pertahanan akan selalu dilematis dan tidak pernah cukup apabila masih bersifat *cost-center*. **Ekonomi pertahanan harus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan bersifat *profit-center*.** Oleh karena itu, kemandirian dalam industri pertahanan yang

dapat diinisiasi dengan konsep pengadaan IDKLO (Imbal Dagang Kandungan lokal dan ofset) harus didorong khususnya untuk alih teknologi. Kemandirian indhan tersebut juga bertujuan untuk mengejar perkembangan teknologi dengan segala potensi ancaman di dalamnya dan diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.



Gambar 2. National Power Morgenthau

Sumber: Materi Ekonomi Pertahanan (Sumarlan, 2021)

Menurut Morgenthau, ekonomi dalam konteks *national power* mencakup tiga aspek yakni geografi, sumber daya alam (*natural resources*) dan kapabilitas industri (*industry capability*). Kekuatan ekonomi tersebut dapat juga menjadi penggerak yang mendorong ekonomi pertahanan (*defense industry – economic*). Ales Olesjnicek menerangkan bahwa ekonomi pertahanan adalah studi tentang alokasi sumber daya (*resource allocation*), pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas yang diaplikasikan terhadap isu-isu terkait pertahanan. Setidaknya ada beberapa tegangan isu ekonomi pertahanan antara lain industri pertahanan, optimasi pertahanan (aplikasi riset operasi), kebijakan dan strategi, kerjasama pertahanan, konflik pertahanan, perdagangan senjata serta pembiayaan pertahanan (Sumarlan, 2021). Karena itu, ekonomi sebagai elemen dasar strategi raya pertahanan tidak pernah bisa dilepaskan dari politik dan militer.

B. Analisis Politik

1. Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*)

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik (Mamahit, 2021). Oleh karena itu, politik dan pertahanan memiliki hubungan yang sangat erat. “*War is merely the continuation of policy by other means*” atau “Perang adalah kelanjutan dari politik”, demikian menurut Carl von Clausewitz dalam karyanya *On War*. Sudirman menyatakan, “politik tentara adalah politik negara” (Supriyatno, 2012). Presiden Sukarno sendiri sebagai pemimpin revolusioner dan pembebas bangsa Indonesia dari kolonialisme memahami politik sebagai bentuk dari dua hal dasar, yakni penyusunan kekuatan (*machtsvorming*) dan penggunaan kekuasaan (*machtsaanwending*) untuk mencapai suatu tujuan. Pandangan Sukarno ini amat dipengaruhi dari sebuah buku berjudul *Der Weg zur Macht* (1909) karya Karl Johann Kautsky, seorang Marxis ortodoks sekaligus pengkritik Vladimir Lenin. Oleh karena itulah, pengetahuan politik diperlukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kepentingan nasional (*national interest*) dan tujuan nasional

dengan demikian dapat diturunkan strategi, postur dan doktrin pertahanan negara yang sejalan dengan kepentingan bangsa.



Gambar 3. Instrumen Politik

Sumber: Materi *Instrumen dalam Strategi Pertahanan* (Midhio, 2021)

Dalam aspek politik, kekuatan terletak pada proses perjalanan sejarah panjang memperoleh kemerdekaan, memertahankan, dan mengisi kemerdekaan hingga Indonesia memiliki sistem politik dengan landasan ideologi Pancasila. Kelemahannya terletak pada proses demokratisasi politik yang menampilkan wajah politik liberal, transaksional, dan berbiaya tinggi sebagai dampak reproduksi model politik ala Amerika Serikat pasca krisis ekonomi tahun 1997. Dalam politik liberal ini, maka partai politik cenderung bertransformasi menjadi Partai Elektoral, yakni menempatkan fungsi kemenangan pemilu sebagai hal utama. Akibatnya terjadi kecenderungan menghalalkan segala cara, termasuk penggunaan issue SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) yang berpotensi memecah belah bangsa. Penerepan demokrasi langsung juga berdampak pada besarnya biaya Pemilu. Pada tahun 2004, anggaran Pemilu sebesar Rp. 3.2 Trilyun, menjadi Rp. 12.3 T pada tahun 2009; dan Rp. 37 T pada tahun 2014, serta diperkirakan Rp. 98 T pada tahun 2024. Inilah kelemahan secara politik. Besarnya biaya Pemilu menyebabkan alokasi belanja yang bersifat strategis seperti untuk keperluan pertahanan negara menjadi berkurang.

Meskipun demikian terbentuknya sistem politik demokrasi Pancasila yang saat ini terus melakukan *alignment* dengan sistem politik dan ekonomi akibat pengaruh globalisasi, tetap menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang menjadi kekuatan utama sistem politik Indonesia. Sistem politik dengan basis ideologi Pancasila juga menjadi landasan bagi peran Indonesia di dunia internasional. Hanya saja, peran aktif yang melekat dengan kepemimpinan Indonesia bagi dunia ini sering terkalahkan oleh perhatian yang begitu besar pada persoalan domestik. Ketegangan ideologis antara Pancasila versus ideologi lain seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, dan khilafahisme masih terjadi. Atas dasar hal tersebut, konsolidasi politik nasional menjadi wajib. Kekuatan politik yang terkonsolidasi akan menciptakan stabilitas politik yang sangat diperlukan di dalam membangun kekuatan pertahanan negara dalam perspektif

luas. Dengan stabilitas politik, Indonesia juga dapat menunaikan tanggung jawabnya bagi dunia. Indonesia, sesuai perintah konstitusi, wajib melibatkan diri secara aktif di dalam upaya mewujudkan tatanan dunia baru yang bebas dari penjajahan, mengedepankan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan, kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keterlibatan Indonesia di dalam upaya menjaga perdamaian dunia ini membawa konsekuensi bagaimana Indonesia harus memiliki kekuatan pertahanan yang handal yang diperlukan bagi terlaksananya tujuan bernegara tersebut.

Ideologi Pancasila, letak geografis yang menumbuhkan pandangan geopolitik khas Indonesia, sistem politik Indonesia yang mampu mensitesakan ideologi besar dunia dan dibumikan sesuai dengan *strategic culture* Indonesia, dan pandangan Indonesia bagi dunia tersebut jika terus dibangun akan menjadi kekuatan politik nasional yang membawa konsekuensi tentang pentingnya kekuatan pertahanan negara Indonesia. Sebab kepemimpinan Indonesia bagi dunia yang menjadi bagian dari falsafah bangsa tersebut, mendorong Indonesia terus berjuang menciptakan kekuatan pertahanan yang efektif untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

2. Peluang (*Opportunity*) dan Tantangan (*Threat*)

. Dalam situasi pandemi Covid-19 yang juga turut mengakselerasi kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi membuka beberapa peluang sekaligus tantangan dalam aspek politik. Secara nyata, realitas pandemi membawa ancaman terhadap keselamatan bangsa, baik dalam keamanan manusia (*human security*) maupun mengancam keamanan negara melalui ancaman resesi ekonomi ke depan yang melumpuhkan. Akan tetapi, pandemi yang melanda seluruh negara membuka peluang untuk diplomasi dan kerja sama luar negeri. Ada peluang dalam upaya penguatan hubungan luar negeri dalam perspektif geopolitik agar penanganan Covid-19 semakin cepat dan efisien, tetapi juga kerja sama terhadap penguatan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu kepentingan nasional.

Sebagaimana dalam logika *game theory*, setiap pergerakan politik aktor negara memuat kepentingan di dalamnya yang akan juga memengaruhi setiap langkah pergerakan pemain lain. Perspektif geopolitik menjadi penting karena kebijakan politik termasuk politik domestik juga dipengaruhi oleh dinamika lingkungan strategis, khususnya dalam bidang pertahanan. Eksistensi Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara membawa konsekuensi logis akan keterlibatan ke dalam konstelasi politik, baik regional maupun global. Terlebih saat ini, polarisasi dunia memiliki karakter multipolar yang melahirkan lingkaran aliansi baru selain blok Barat dan Blok Timur, seperti misalnya kekuatan alternatif BRICS (Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan).

Akan tetapi, dinamika semacam ini juga memunculkan ketegangan yang rentan potensi konflik seperti India-Pakistan, China-Taiwan, Korut-Korsel, Iran-Israel, juga rivalitas AS-China dan Rusia-AS. Isu ketegangan kawasan Laut Cina Selatan (LCS) atas klaim sepihak China melalui *nine dash line* yang memunculkan konflik dengan negara-negara kawasan juga menjadi fenomena penting karena turut melibatkan kekuatan global.

(Setiadji, 2020). Berbagai konflik tersebut, pada dasarnya dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk menjadi *peace facilitator* negara kawasan yang sejak awal menegaskan posisinya untuk netral, berangkat dari semangat non-blok yang tidak memihak dan sejalan dengan tujuan nasional untuk memperjuangkan perdamaian dunia.

Tantangan Indonesia dalam bidang politik dan pertahanan, termasuk juga dalam perundingan batas-batas maritim dengan negara-negara tetangga yang belum selesai seperti batas laut territorial dengan Malaysia, batas ZEE dengan Vitenam dan Palau sekaligus menegaskan batas maritim pada beberapa kategori seperti wilayah laut, landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai dengan yang diakui dalam UNCLOS 1982. Mengingat visi Pemerintah dalam konteks *Maritime Domain Awareness* (MDA) untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD), *center of gravity* dari kawasan Indo-Pasifik, maka seluruh wilayah perbatasan maritim perlu diperjelas dan dipertegas melalui jalur diplomasi politik agar tidak menyisakan potensi ancaman konflik dengan negara tetangga.

Tantangan dalam singgungan antara elemen politik dan strategi pertahanan terutama adalah sinkronisasi antara diplomasi politik dan efek *deterrence* pertahanan yang dapat saling memperkuat guna mencapai kepentingan nasional. Dua kekuatan baik politik maupun pertahanan ini juga sejalan dengan pandangan Sukarno dimana perjuangan diplomasi maupun perjuangan bersenjata (perang) merupakan taktik dan sebagai alat politik untuk kepentingan atau tujuan yang bersifat strategis dalam upaya mempertahankan eksistensi dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kombinasi perjuangan antara diplomasi dan militer ini juga diterapkan oleh Sukarno di dalam upaya merebut kembali Irian Barat dari kolonialisme Belanda.

Di tengah situasi lingkungan strategis yang semakin *borderless* dan dinamis, Indonesia diharapkan dapat memaksimalkan peran politiknya, baik di dalam negeri dengan memperkuat industri pertahanan negara secara berdikari, tidak hanya bertindak defensif pasif namun juga harus aktif dalam peran diplomasi luar negeri di tingkat global dalam memperjuangkan tujuan nasional yakni melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

C. Analisis *Grand Strategy*

Strategi pertahanan negara dirumuskan dalam tiga substansi dasar strategi pertahanan, yang meliputi “apa yang dipertahankan” (*ends*), “dengan apa mempertahankan” (*means*), serta “bagaimana mempertahankan” (*ways*). Selain itu, ditambahkan juga satu substansi yakni risiko (*risk*), “Berapa kalkulasi biaya/risiko” dalam menjalankan serangkaian tindakan operasional tersebut.



Gambar 4: The Lykke Model

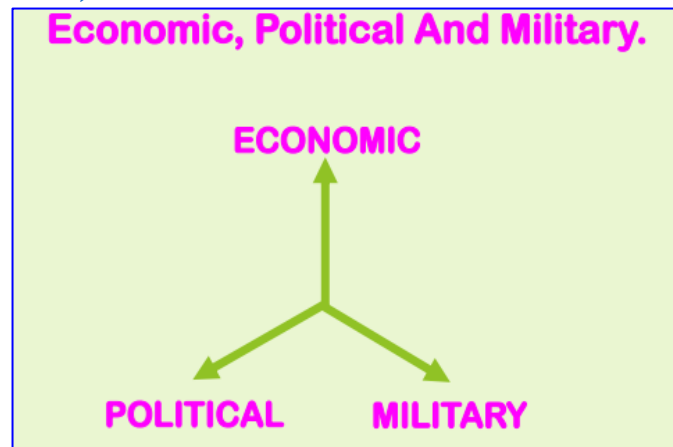
Sumber: (Kemhan, 2014)

Bagi Lykke, strategi adalah tentang menjaga keseimbangan (*balance*) antara ketiga hal tersebut (*ends*, *ways*, dan *means*) ibarat tiga kaki bangku. Tujuan harus realistis, cara atau metode mengandung risiko seminimal mungkin dan sumber daya atau *resources* cukup untuk menjalankan strategi tersebut. Jika salah satu dari ketiga hal tersebut kurang, strategi tidak akan seimbang (*out of balance*) dan berisiko tinggi. Melihat analogi tiga kaki bangku di atas, Lykke menegaskan bahwa setiap langkah strategi mengandung risiko, maka strategi yang baik melakukan penyesuaian (*adjustment*) antara tujuan, konsep dan sumber daya. Ketika sumber daya (*means*) tidak mencukupi, maka harus dicari jalan alternatif. Seluruh proses menyeimbangkan (*balancing*) tiga pilar dan membuat pilihan dalam pengambilan keputusan inilah yang menjadi jantung atau pusat dari seni dalam strategi.

Ends atau *goal* dapat diartikan sebagai tujuan strategis pertahanan, yakni demi menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, keselamatan segenap bangsa yang dijabarkan menjadi empat sasaran strategis. *Means* adalah sumber daya nasional atau kekuatan-kekuatan militer dan kekuatan pengganda yang digunakan untuk mempertahankan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yakni mengerahkan Pertahanan Militer yang diintegrasikan dan disinergikan dengan Pertahanan Nirmiliter. Sedangkan *ways* adalah bagaimana menggunakan sumber daya nasional untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dipertahankan, yakni dengan merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan suatu Sistem pertahanan negara yang tangguh dan berdaya tangkal tinggi sesuai dengan paham bangsa Indonesia tentang damai dan perang (Buku Putih Pertahanan, 2014).

Dengan demikian, strategi merupakan perpaduan antara seni dan ilmu sebagaimana dalam pengertian *grand strategy* atau yang biasa disebut *national strategy*, baik yang dirumuskan oleh Luttwak maupun Kuypers. Pada dasarnya, strategi merupakan seni dan ilmu dalam pengembangan, pengaplikasian dan koordinasi atas berbagai instrument kekuatan nasional (*national power*) yang bersifat multi dimensi seperti diplomasi politik, ekonomi, militer dan juga pengaruh lain yang berkembang seperti

budaya dan informasi untuk mencapai obyektif yang berkontribusi terhadap kepentingan nasional (Toruan, 2021).



Gambar 5: Elements of Strategy

(Henry C. Barlett & G. Paul Holman, 1991 dalam Toruan, 2021).

Strategi sebagai sebuah kajian merupakan instrument yang berfokus pada pembentukan lingkungan masa depan. Dalam absennya strategi, tidak ada arahan yang jelas (*clear direction*) di masa depan karena pendekatan sistematis yang berhubungan dengan dinamika perubahan lingkungan strategis. Strategi mencoba menemukan titik keseimbangan antara persoalan saat ini dan menyusun rencana guna mengantisipasi posibilitas ancaman masa depan. Karena itu, berpijak pada kepentingan nasional, strategi perlu terus dikembangkan dengan melihat tiga elemen dasar: Politik, Ekonomi dan Militer serta teknologi informasi dan *culture* sebagai faktor internasional yang mempengaruhi kompleksitas framework lingkungan (Llyod, 2004 dalam Toruan, 2021).

Pembangunan strategi pertahanan nasional yang kuat dalam rangka pembangunan kebijakan doktrin dan postur pertahanan negara perlu menimbang beberapa faktor antara lain (Swastanto, 2021):

1. Faktor geografis negara berdasarkan kekhasan identitasnya sebagai negara kepulauan. Bukan hanya negara sendiri, melainkan juga dalam hubungan dengan negara-negara kawasan maupun global dalam konteks geopolitik.
2. Sumber daya nasional (sumdanas), analisis kemungkinan ancaman yang akan muncul. Baik ancaman aktual seperti pandemi (Covid-19), Konflik Laut Cina Selatan, merosotnya pertumbuhan ekonomi, pelanggaran wilayah perbatasan, intervensi asing, pemberontakan, terorisme, spionase, serangan senjata biologis, bencana alam, pencurian kekayaan alam, peredaran narkoba, imigran asing, dampak revolusi industri dan isu-isu pertahanan keamanan nasional lainnya.
3. Perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi yang eksponensial ini mendapat tekanan khusus karena perubahan lingkungan strategis juga dipicu oleh revolusi dalam teknologi informasi yang begitu cepat. Dengan demikian, melahirkan potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang baru. Potensi ancaman seperti *cyber war*, energi, sumber daya, persenjataan canggih teknologi tinggi dan

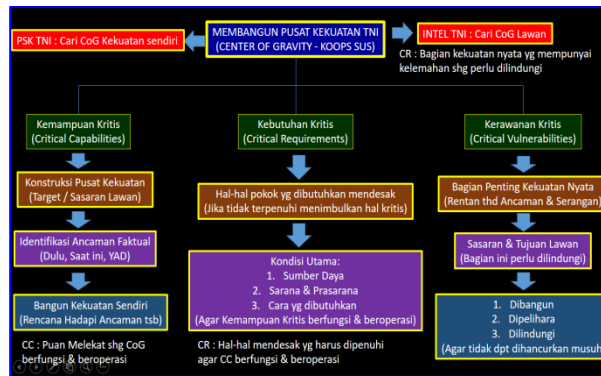
konsep *revolution military affairs* digerakkan oleh semangat kemajuan *hybrid* antara teknologi dan lingkungan strategis pertahanan negara.

Tujuan Pertahanan Negara (Hanneg) adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Karena itu, membangun kebijakan strategi pertahanan membutuhkan suatu *road map* jangka panjang, *grand strategy* yang terintegrasi dengan elemen-elemen dasar baik ekonomi maupun politik. Dalam aspek ekonomi, kekuatan dapat tentu dibangun dari pertumbuhan ekonomi atas produksi sumber daya nasional, namun lain daripada itu juga perlu didorong pada target kemandirian industri pertahanan.

Kemandirian industri pertahanan sebagai salah satu implementasi strategi pertahanan memerlukan kolaborasi elemen-elemen, baik ekonomi, politik maupun pertahanan. Kesatuan gerak elemen-elemen tersebut diperlukan dalam penerapan prinsip perencanaan berbasis kapabilitas (*capability-based*) yang bergeser dari model berbasis ancaman (*threat-based*) sebagai tanggapan atas sifat konflik, kompleksitas dan ketidakpastian dalam lingkungan keamanan global (Yusgiantoro, 2014). Seperti misalnya *security dilemma* atas pengembangan *Revolution in Military Affairs* negara-negara maju, atau isu konflik geopolitik kawasan di Laut Cina Selatan yang kompleks dan memerlukan kekuatan diplomasi pertahanan dalam usaha meredam ketegangan. Karena kekuatan bertarung: salah satu instrumen strategi besar, memperhitungkan dan menerapkan kekuatan tekanan finansial, tekanan diplomatik, tekanan komersial, dan, tekanan etis, untuk melemahkan kemauan lawan”. (Putro, 2021).

Grand Strategy mesti memuat tiga elemen dasar strategi Hanneg: membentuk, merespon, menyiapkan. Suatu strategi yang membentuk lingkungan keamanan nasional dan internasional yang dapat menjamin kepentingan nasional, merespon berbagai spektrum krisis dan mampu mempersiapkan suatu pertahanan untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti melalui upaya pembangunan kekuatan, pengembangan konsep, dan pengorganisasian pertahanan yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melindungi kepentingan nasional. Dalam konteks ini, *grand strategy* juga perlu dilihat dalam analisis lingkungan strategis dan konsepsi geopolitik, geoekonomi dan geostrategi yang saling terhubung satu sama lain.

Desain strategi pertahanan perlu diarahkan pada bangunan pusat kekuatan TNI sebagai *center of gravity* (CoG) yang memotret dengan jelas aspek kemampuan kritis (*critical capabilities*), kebutuhan kritis (*critical requirements*) dan kerawanan kritis (*critical vulnerabilities*). Dengan potret tersebut, strategi memuat unsur penemuan (*discovery*) dan juga petunjuk (*direction*) untuk siap meningkatkan kapabilitas dan siap menghadapi turbolensi peradaban baik dalam kesatuan elemen baik ekonomi, politik maupun pertahanan sehingga berdaya guna demi tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh kebijaksanaan politik (Toruan, 2021).



Gambar 6: Center of Gravity Kekuatan TNI

Sumber: Materi Overview on Global, Regional and National Counter Terrorism Policy and Strategy (Widodo, 2021)

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang aspek *grand strategy*, *elements of strategy*, dan pembangunan startegi pertahanan negara, maka secara umum ditegaskan bahwa pertahanan negara sangat menentukan *survival* tidaknya suatu bangsa. Atas dasar hal tersebut, maka berbagai kelemahan secara ekonomi dan politik harus diatasi, dan pada saat bersamaan memperbesar peluang dan membangun kapabilitas pertahanan nasional guna mengatasi berbagai tantangan guna memperkuat sumber daya nasional bagi pertahanan negara. Dampak yang diharapkan adalah penurunan biaya politik, kehidupan politik yang kondusif, dan stabilitas politik. Penghematan biaya pemilu dapat mendorong stabilitas fiskal, dan perbaikan iklim perekonomian yang pada gilirannya alokasi anggaran untuk pertahanan berpotensi dapat ditingkatkan.

Selain mengatasi berbagai kelemahan secara politik dan ekonomi, strategi pertahanan negara juga dilakukan dengan meningkatkan peluang dan mengatasi berbagai tantangan dengan membangun kapabilitas pertahanan nasional, baik dari aspek strategi, doktrin, postur pertahanan melalui penguatan penguasaan teknologi pertahanan, peningkatan kemampuan industri pertahanan dalam negeri, kerjasama pertahanan, diplomasi pertahanan, dalam kerangka *grand strategy* melalui pendekatan teori dalam pembahasan di atas. Diplomasi luar negeri ini paralel dengan diplomasi pertahanan dan diplomasi perdagangan guna memastikan keamanan LCS bagi seluruh *stakeholders*. Apabila Indonesia berhasil memainkan peran kunci di kawasan LCS dan mencari solusi komprehensif yang bisa diterima semua pihak, maka hal tersebut menjadi daya *leverage* bagi Indonesia di dalam membangun kerjasama pertahanan.

BIBLIOGRAFI

- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. [Google Scholar](#)
- Bappenas. (2006). *Stabilitas Politik Dalam Era Demokratisasi Sebagai Prasyarat Iklim Investasi Yang Kondusif*. Jakarta: Bappenas. [Google Scholar](#)
- Gray, Colin S. (2015). *The Future of Strategy*. Polity Press. [Google Scholar](#)
- Humphrey, A. (2005) *SWOT Analysis for Management Consulting*. SRI Alumni Newsletter. United States: SRI International. [Google Scholar](#)
- Kemhan. (2014). *Strategi Pertahanan Negara*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. [Google Scholar](#)
- Kemhan. (2015). *Postur Pertahanan Negara*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. [Google Scholar](#)
- Liddle, R. William. 2012. *Memperbaiki Mutu Demokrasi di Indonesia Sebuah Perdebatan*. Jakarta: Pusat Studi Agama & Demokrasi (PUSAD), Yayasan Wakaf Paramadina. [Google Scholar](#)
- Mahroza, Jonni. (2021). *Materi Program Doktor Ilmu Pertahanan: Kerja Sama Pertahanan*. Jakarta: Universitas Pertahanan. [Google Scholar](#)
- Mamahit, Desi Albert. (2021). *Materi Program Doktor Ilmu Pertahanan: Politik dan Strategi*. Jakarta: Universitas Pertahanan. [Google Scholar](#)
- Midhio, I Wayan. (2021). *Materi Program Doktor Ilmu Pertahanan: Instrumen dalam Strategi Pertahanan*. Jakarta: Universitas Pertahanan. [Google Scholar](#)
- Milles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. [Google Scholar](#)
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. [Google Scholar](#)
- Morgenthau, Hans J. (2005). *Politics Among Nations – The Struggle for Power and Peace*, (revised by Kenneth W Thompson, 7th edition). McGraw-Hill Education. [Google Scholar](#)
- Priyono, Juniawan & Purnomo Yusgiantoro. (2017). *Geopolitik, Geostrategi dan Geoekonomi*. Jakarta: Universitas Pertahanan. [Google Scholar](#)
- Putro, Resmanto Widodo. 2021. *Materi Program Doktor Ilmu Pertahanan: Elemen Strategi Pertahanan Negara*. Jakarta: Universitas Pertahanan. [Google Scholar](#)
- Runkle, Becky Sheetz. (2014). *The Art of War for Small Business: Defeat the Competition and Dominate the Market with the Masterful Strategies of Sun Tzu*. Amacom. [Google Scholar](#)
- Setiadji, Agus. (2020). *Ekonomi Pertahanan: Menghadapi Perang Generasi Keenam*. Jakarta: Universitas Pertahanan. [Google Scholar](#)

- Sumarlan, Sutrimo. (2021). *Materi Program Doktor Ilmu Pertahanan: Pengantar Ekonomi Pertahanan*. Jakarta: Universitas Pertahanan. [Google Scholar](#)
- Supriyatno, Makmur. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. [Google Scholar](#)
- Swastanto, Yoedhi. 2021. *Materi Program Doktor: Pengantar Strategi Pertahanan*. Jakarta: Universitas Pertahanan. [Google Scholar](#)
- Toruan, Tahan Samuel L. (2021). *Materi Program Doktor Ilmu Pertahanan: Pemahaman dan Definisi Strategi Pertahanan*. Jakarta: Universitas Pertahanan. [Google Scholar](#)
- Toruan, Tahan Samuel L. (2021). *Materi Program Doktor Ilmu Pertahanan: Ancaman Terhadap Keamanan Nasional: Menganalisa dan Mengklasifikasi Ancaman Nyata*. Jakarta: Universitas Pertahanan. [Google Scholar](#)
- Widodo, Pujo. (2021). *Materi Program Doktor Ilmu Pertahanan: Overview on Global, Regional and National Counter Terrorism Policy and Strategy*. Jakarta: Universitas Pertahanan. [Google Scholar](#)
- Yusgiantoro, Purnomo. (2014). *Ekonomi Pertahanan, Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. [Google Scholar](#)

First publication right:

[Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia](#)

This article is licensed under:

